

GLOBALISASI, POSTMODERNISME DAN TANTANGAN KEKINIAN SOSIOLOGI INDONESIA

Oleh: Hamzah Fansuri^{*)}

Abstract

Sociology of Indonesia in its development to date is a study that is often unaware of the attention in academic circles. Although in the early phase of institutionalization has emerged original ideas that seeks to explore aspects of sociology rooted in cultural, historical, and social problems and political economy of Indonesian society, but the idea is then that such stagnation triggered by the political power of the New Order regime . In addition, the U.S. dominance in the context of post-World War II when it's against the developing countries or countries of the former colonial influence is so strong to the realm of science in which scientific products become more mainstream in social science such as theory-paradigm of modernization theory and Parsonian functionalism and even still continues to this day, so reap the methodological debate.

Meanwhile, globalization as a contemporary phenomenon that can not be avoided it has become a space for the emergence of various alternative approaches to address the scientific challenges of the times in which the boundaries between regions ranging from the regional to the global scope are blurred, as well as theoretical, paradigmatic and conceptual that has shaken confidence in the classical sociology itself, such as the concept of society. So is the epistemology of postmodernism and post-structuralism through their thinkers, who were born as the antithesis of the unhappiness of the modernization project, the more enriching the treasure of the sociology of science by offering new approaches to deconstructive, sided with the Others and brought the idea of liberation.

Therefore, the sociology of Indonesia is a science projects that continue to face the challenges of the times, since the post-World War II marked the superiority of the U.S. social sciences until it became stronger when globalization threatens human survival and therefore requires a new science device that remains refers to the special characteristics that exist in Indonesian society.

Kata Kunci: Globalisasi, Posmodernisme, Sosiologi Indonesia

^{*)} Dosen pada jurusan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Email: avantgarde818@gm

Pendahuluan

Fenomena masyarakat kapitalisme di mana industrialisasi yang kemudian mendorong proses urbanisasi itu berlangsung di masyarakat, telah lama menjadi sorotan oleh banyak pemikir sosiologi awal termasuk Emile Durkheim yang memberi perhatiannya pada pembagian kerja (*division of labour*) saat proses itu berlangsung dalam hubungannya dengan tatanan sosial dalam arti yang lebih luas, atau dengan istilah Durkheim sendiri yaitu solidaritas sosial. Karena itu Durkheim dikenal membagi tipe solidaritas sosial dalam masyarakat menjadi dua. *Pertama*, solidaritas mekanik yaitu adanya ikatan yang didorong oleh faktor emosional, kekeluargaan, kepercayaan serta kesepakatan dalam urusan moral pada masing-masing anggota masyarakat dengan tingkat pembagian kerja yang rendah. Sehingga sifat-sifat individualistik dan perbedaan-perbedaan dalam masyarakat itu, dirasakan tidak cocok dan oleh karenanya diupayakan untuk sedapat mungkin dihindari. *Kedua*, solidaritas organik yang berkebalikan dari solidaritas mekanik, karena ia lahir pada masyarakat dengan tingkat pembagian kerja yang tinggi di mana ikatan-ikatan emosional dan sebagainya itu menjadi tidak relevan disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang dimungkinkan terjadi terutama berdasarkan pada kemampuan-kemampuan individu serta bagaimana masing-masing anggota masyarakat terikat oleh adanya ketergantungan fungsional.¹

Pembagian tipikal masyarakat berdasarkan pembagian kerja yang membentuk solidaritas sosial tersebut pada akhirnya menunjukkan gejala-gejala sosial yang lahir dari perkembangan lanjut kapitalisme (*late capitalism*) melalui industrialisasi yaitu terciptanya heterogenitas dalam masyarakat, dan kecenderungan ini tampak terutama pada masyarakat perkotaan yang menjadi ruang bagi pertumbuhan industri. Sedangkan pada masyarakat perkotaan sifat-sifat kebebasan individu lebih ditonjolkan, dengan itu ikatan-ikatan emosional pun menjadi lepas. Masing-masing orang lebih dihargai dan diperhatikan dari kemampuan serta bagaimana ia menjadi fungsional dalam kerja yang menuntut efisiensi dan efektifitas seperti yang disebut Durkheim dengan solidaritas organik tersebut. Demikian halnya Max Weber yang menilai ilmu pengetahuan dan rasionalitas sebagai logika utama dalam kapitalisme, sehingga menuntut setiap orang berada dalam proses *survival of the fittest*. Dan, agar kapitalisme bekerja dengan baik, uang menjadi orientasi utama sebagaimana anjuran dalam agama protestan mengenai keselamatan hidup. Karena itu menurut Weber, efektifitas dan efisiensi menjadi prinsip kerja yang rasional dalam kapitalisme.²

¹ Hanneman Samuel, *Emile Durkheim: Riwayat, Pemikiran, dan Warisan Bapak Sosiologi Modern* (Depok: Kepik Ungu, 2010), hal. 38-51

² Lihat Stanislav Anreski, *Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi dan Agama* (Jogjakarta: Tiara Wacana, 1989)

Kemajemukan dalam masyarakat industri di era kapitalisme modern kemudian menggiring terbentuknya kelas-kelas sosial yang didasari oleh faktor ekonomi. Jika jauh-jauh hari Aristoteles misalnya, membagi kelas sosial dalam masyarakat secara ekonomi menjadi golongan sangat kaya, kaya, dan miskin. Di mana, golongan pertama merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat, terdiri dari pengusaha, tuan tanah dan bangsawan. Golongan kedua merupakan golongan yang cukup banyak terdapat di dalam masyarakat, terdiri dari para pedagang, dan sebagainya. Serta, golongan ketiga merupakan golongan paling banyak dalam masyarakat yakni rakyat biasa. Sementara Karl Marx saat mengkritik kapitalisme pada konteks industrialisasi, membagi kelas sosial dalam masyarakat menjadi tiga yaitu kelas borjuis-kapitalis yang merepresentasikan para pemilik modal dan pemilik alat-alat produksi, kelas menengah yang diisi oleh pegawai-pegawai pemerintahan, serta kelas proletar yang dihuni oleh para buruh-buruh pabrik. Namun secara umum, konsepsi kelas sosial cenderung digunakan untuk menunjuk lapisan sosial berdasarkan kriteria ekonomi yang selalu berbentuk piramida dengan sejumlah kecil manusia berada di posisi puncak.

Sosiologi Indonesia di Tengah Tantangan Zaman

Dalam bentang historis bangsa Indonesia, diketahui bahwa sepak terjang kekuasaan Orde Baru turut andil membentuk paradigma dalam ilmu sosial Indonesia khususnya sosiologi di mana konsep "kelas" yang menjadi salah satu konsep kunci dalam membaca perkembangan masyarakat dari berbagai sudut pandang nyaris hilang karena alasan-alasan yang politis dan atau ideologis yang dampaknya adalah bagaimana paradigma kritis di masa Orde Baru pun dihindari karena dianggap membawa pengaruh gagasan-gagasan Marxisme yang diidentikkan dengan unsur-unsur subversi, dan yang mengarah kepada konflik. Sementara guna melancarkan pembangunan yang menjadi kiblat utama Orde Baru tersebut, pemerintah kala itu sangat antusias menjaga keutuhan negara agar tidak terjadi perpecahan (disintegrasi) sehingga persoalan-persoalan di masyarakat menjadi salah satu isu pokok yang diperhatikan dan bahkan untuk hal tersebut pihak militer diturunkan sampai ke tingkat pedesaan.

Dalam sosiologi dan ilmu sosial lainnya, paradigma kritis ini cenderung muncul sebagai antitesa dari dominasi ilmu sosial empiris-analitik –di mana persoalan kemasyarakatan dipelajari dengan kecanggihan mekanisme relasi kausalitas, sementara paradigma kritis sendiri bermaksud memberi perhatian yang lebih pada spirit pembebasan manusia dari struktur kekuasaan yang dominan.³ Oleh karena itu, sebagian kalangan terutama ilmuwan sosial yang

³ Lihat Anthony Giddens, *Metode Sosiologi: Kaidah-kaidah Baru* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

berada di luar lingkaran kekuasaan, aktivis mahasiswa dan kelompok LSM mulai mempertanyakan ulang proyek modernisasi saat itu, mengingat produk yang dihasilkannya tidak kunjung melahirkan tatanan masyarakat modern dan menjawab kebutuhan-kebutuhan riil di masyarakat, di samping juga kerap membelenggu nilai-nilai demokrasi.

Saat globalisasi menemukan kerannya seiring dengan kapitalisme lanjut (late capitalism)⁴ diikuti dengan kampanye "tatanan dunia baru" (the new world order) oleh juru-juru bicaranya seperti Harry S. Truman, Ronald Reagan, Bill Clinton, Margaret Thatcher, dan Tony Blair dalam konteks pasca Perang Dunia II, Perang Dingin serta runtuhnya komunisme. Saat itu pula menjadi penanda globalisasi ekonomi dan dimulainya era pasar bebas (laissez faire) yaitu beroperasinya secara masif lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), perusahaan-perusahaan transnasional dan multinasional (TNC's, MNC's), serta melibatkan lembaga-lembaga keuangan internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) sebagai aktor utama akumulasi modal. Keberadaan lembaga-lembaga dunia inilah yang kemudian mendominasi hampir semua aspek kehidupan bahkan menyangkut kekuasaan dan kedaulatan sebuah negara. Negara dalam kondisi semacam ini semata-mata hanya berperan sebagai pelaksana dari kebijakan yang sudah dirancang oleh pasar semacam deregulasi, liberalisasi dan privatisasi.⁵

Terhadap gencarnya globalisasi ini, Arjun Appadurai dalam *Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy* menyorot lima arus utama dalam proses globalisasi tersebut yaitu *ethnoscape*, *technoscape*, *financescape*, *mediascape* dan *ideoscape*. *Ethnoscape* yaitu sebuah gambaran mengenai perpindahan orang-orang di seluruh dunia di mana kita hidup seperti: wisatawan, imigran, pengungsi, orang buangan, tenaga kerja asing, dan kelompok-kelompok serta aktivitas individu lainnya tanpa menafikan adanya komunitas yang relatif stabil lewat pola-pola kekerabatan dan atau hubungan pekerjaan. *Technoscape* merupakan konfigurasi global di bidang teknologi yang kini bergerak dengan kecepatan tinggi semisal persoalan mekanik atau informasi. Contohnya banyak negara sekarang menjadi akar dari perusahaan multinasional seperti sebuah kompleks baja besar di Libya yang melibatkan kepentingan dari India, Cina, Rusia, serta Jepang, karena menyediakan berbagai komponen konfigurasi teknologi baru. *Financescape*, berarti disposisi modal global yang misterius dan bergerak cepat seperti pasar mata uang, bursa

⁴ Padanan kata "late capitalism" ini merujuk pada pemikiran Fredric Jameson dalam tulisannya "Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism", yang dimuat di *New Left Review* tahun 1984.

⁵ Norena Heerzt, *Perampok Negara: Kuasa Kapitalisme Global dan Matinya Demokrasi*, (Jogjakarta: Alenia, 2005)

saham, dan berbagai komoditas yang terus bergerak. *Mediascapes* merujuk pada distribusi kemampuan elektronik untuk memproduksi dan menyebarkan informasi lewat surat kabar, majalah, stasiun televisi, dan studio produksi film, yang sekarang tersedia untuk semakin banyak kepentingan pribadi dan publik di seluruh dunia, serta gambaran dunia yang diciptakan oleh media. *Ideoscapes* juga bagian dari rangkaian gambar, namun mereka sering bernuansa politis dan sering harus melakukannya dengan ideologi suatu negara atau ideologi tandingan (counter-ideology) yang berorientasi untuk menangkap kekuasaan negara atau bagian darinya.⁶

Maka terlihat bahwa globalisasi bekerja bukan semata dalam berbagai tata kebijakan ekonomi politik global yang dipaksakan pada kebijakan publik melalui deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi. Namun juga memproduksi ragam budaya kapitalisme berbentuk identitas dan gaya hidup global. Alih-alih menawarkan keragaman pilihan bagi konsumen, globalisasi justru menyeragamkan 'rasa dan selera'. Atau dengan istilah lain bahwa masyarakat global digambarkan tengah mengalami, meminjam istilah Ritzer, 'McDonaldisasi'.

Uraian Appadurai di atas pada dasarnya ingin memberi penegasan terkait bagaimana mobilitas baik perorangan atau kelompok saat ini yang berlangsung secara masif dengan durasi yang cepat. Mobilitas ini pun semakin variatif mulai dari manusia itu sendiri, modal (kapital), gambar (image), serta beragam informasi di mana masing-masing saling memiliki keterkaitan serta berdampak secara sosial. Pada realitas sosial di tengah-tengah globalisasi yang demikian, sosiologi sebagai disiplin ilmu tersendiri telah dirongrong secara mendasar karena telah menghilangkan konsep masyarakat itu sendiri yang sudah sejak lama menjadi perhatian utamanya. John Urry dalam *Sociology beyond Societies* (2000) menguraikan bagaimana sosiologi dalam konteks kekinian mendapatkan tantangan besar terutama sejak globalisasi berlangsung, sehingga secara keilmuan konsep masyarakat tersebut perlu diterjemahkan ulang dengan mengalihkan perhatiannya pada pola-pola interaksi sosial yang semakin canggih, mobilitas orang-perorangan yang semakin cepat, hadirnya berbagai macam bentuk agensi serta persoalan kewarganegaraan (citizenship) dalam lingkup global dan peran dari negara-bangsa dalam menjaga bentuk-bentuk kekuasaan yang ada pada ruang lingkup nasional.⁷

Mobilitas yang dimaksud Urry adalah terlibatnya bermacam objek dan teknologi pada skala besar sehingga melahirkan bermacam pula problem-

⁶ Arjun Appadurai, "Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy" dalam *Media and Cultural Studies: Keywords*, Meenakshi Gigi Durham & Douglas M. Kellner (Eds), (Oxford: Blackwell Publishing, 2006), hal. 584-603

⁷ John Urry, *Sociology Beyond Societies: Mobilities for The Twenty-First Century*, (New York: Routledge, 2000), hal. 2

problem sosial di masyarakat. Sebagian besar literatur yang ada mengenai mobilitas sosial ini memposisikan masyarakat layaknya sebuah permukaan dalam cara pandang geografis, karena itu menurut Urry, seringkali cara seperti ini tidak berhasil untuk menunjukkan beragam titik temu yang ada pada satu wilayah tertentu, seperti di kota dan tempat-tempat lainnya, dengan berdasarkan kategori kelas sosial, gender dan etnis.⁸ Oleh karena itu, masyarakat (society) dalam disiplin sosiologi pun bergeser menjadi mobilitas (mobility) sosial seiring dengan perkembangan dunia yang sudah tanpa sekat sebagai karakter dari globalisasi.

Alain Touraine (2007) dengan nada yang sama dalam tulisannya *Sociology after Sociology* juga mempertanyakan ulang bagaimana sosiologi klasik—seperti pada pemikiran Comte dan Durkheim—tidak banyak mempelajari dunia secara keseluruhan. Akan tetapi lebih banyak menaruh perhatian pada apa yang disebut dunia yang beradab, karena itu pula sosiologi klasik ini memperkenalkan oposisi yang tegas antara masyarakat beradab, barbar serta masyarakat jajahan.

*Classical sociology did not study the world in its entirety, but only what was called the civilized world, introducing a sharp opposition between civilized and savage or colonized peoples.*⁹

Touraine di samping mengajak pada telaah akan sosiologi kontemporer yang disebabkan terjadi penurunan pada sosiologi klasik, sehingga baginya dibutuhkan penciptaan ruang-ruang intelektual baru di mana tercipta konstelasi berbagai pikiran yang muncul saat ini, atau dalam bahasa Touraine sendiri disebut sebagai sosiologi ultra-modernitas.¹⁰ Ia juga bermaksud memberi perhatian yang lebih pada sosiologi baru tersebut, yang dijelaskan oleh masa depan daripada masa lalunya, terutama karena tidak hanya mampu mengkritik, namun ada upaya misalnya, menggabungkan psikoanalisis Freudian serta Marxisme. Karena itu menurut Touraine sosiologi hari ini haruslah membangun dan menciptakan dirinya sendiri, mengubah dirinya sendiri secara terus-menerus, dan bukannya terkungkung di bangku-bangku perkuliahan semata yang keberadaannya hanya bisa membentuk beberapa generasi. Sebagaimana yang dikatakan Zygmunt Bauman, dalam konteks ia mengkritisi modernitas, bahwa sosiologi saat ini hendaknya dapat menerangi irama kehidupan sehari-hari. Bagi Bauman yang mengikuti Marx, segala bentuk praktik dan aktualitas

⁸ *ibid.*, hal. 3

⁹ Alain Touraine, "Sociology after Sociology", *European Journal of Social Theory* (No.10, vol 2 th. 2007), hal. 186

¹⁰ *ibid.*, hal. 187

harus lah menjadi bukti dari kebenaran objektif yang sekaligus membuktikan keberpihakan dari pemikiran itu.¹¹ Oleh karenanya, jika Bauman melihat kebutuhan untuk pengembangan sosiologi kritis (critical sociology) yang sempat dipertanyakan kemungkinannya menjadi sebuah ilmu, Touraine justru mengakui secara *de facto* keberadaan sosiologi, yang sebutnya dengan sosiologi baru tersebut belum diiringi dengan refleksi diri terutama di kalangan sosiolog. Refleksi ini dimaksudkan pada adanya kemungkinan untuk menjalin komunikasi yang lebih baik antara para pelaku dalam upaya pengembangan sosiologi baru tersebut sekaligus membuka tabir yang nyaris menutupi beragamnya kepentingan di balik proses fragmentasi dalam pengetahuan sosiologi yang sedang terjadi.¹²

Globalisasi sebagai fenomena kekinian yang menggiring berbagai perubahan sosial itu pada tempat yang lain menghadirkan, sebagaimana Urry di atas, telaah dan pemahaman baru terhadap terciptanya pola-pola interaksi sosial terutama karena topangan kemajuan teknologi komputerisasi dan internet. Dalam konteks ini, Manuel Castells menyebutkan bahwa tugas dari sosiologi di era globalisasi –terutama didorong oleh kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi—adalah mempelajari proses pelebagaan, organisasi, serta perubahan pada suatu masyarakat baru, yang mungkin bisa dimulai dari pembacaan atas struktur sosialnya, atau apa yang oleh Castells disebut dengan masyarakat jejaring (network society).¹³

Lebih lanjut Castells melihat dimensi-dimensi utama dari perubahan sosial tersebut yang secara bersamaan menyatu dalam interaksi sosial di masyarakat dan merupakan struktur sosial yang baru, sebagai faktor yang mendasari lahirnya "masyarakat baru" (new society). Castells dengan itu menjabarkan tiga dimensi sosial yang melandasi terbentuknya masyarakat baru tersebut, yang dinamakannya masyarakat jejaring. Pertama, adalah paradigma teknologi baru yang didasari oleh penyebaran teknologi informasi. Dengan mengikuti Claude Fischer (1992), ia memahami teknologi sebagai budaya material ibarat proses sosial yang inheren dalam masyarakat, bukan sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi masyarakat. Dimensi kedua adalah, globalisasi yang dipahami sebagai peningkatan kapasitas teknologi, organisasi, serta kelembagaan dari komponen inti sistem tertentu (semisal, ekonomi) sehingga bisa bekerja pada satu waktu yang bersamaan dan menjangkau skala luas mencakup seluruh jagat raya. Dan dimensi ketiga adalah wujud manifestasi

¹¹ Zygmunt Bauman, *Towards A Critical Sociology: An Essay on Commonsense and Emancipation*, (London & Boston: Routledge, 2009), hal. 81-92

¹² Alain Touraine, *op.cit.*, hal. 192-193

¹³ Manuel Castells, "Toward a Sociology of the Network Society", *Contemporary Sociology* (Vol. 29, No. 5 th. 2000), hal. 693

budaya yang dominan pada sebuah *hypertext*, yaitu interaksi lewat perantara media elektronik, yang menjadi acuan dalam pengolahan simbolis dari semua sumber dan pesan.¹⁴ Jika dahulu teks standar menjadi acuan utama pada penyampaian pesan, maka *hypertext* bermakna juga multi-teks yaitu meliputi gambar, suara (audio-visual). Castells mencontohkan internet yang jumlah penggunaannya berkembang sangat pesat dari tahun ke tahun, yang telah menghubungkan individu serta kelompok antara diri mereka sendiri dan terbagi ke *hypertext* multimedia. *Hypertext* ini merupakan tulang punggung dari budaya baru, yaitu budaya virtualitas yang nyata, di mana virtualitas menjadi komponen dasar dari lingkungan simbolik di sekitar kita, sehingga dengan demikian membentuk pengalaman kita sebagai makhluk yang terus berkomunikasi.¹⁵

Gambaran di atas turut memberi implikasi pada perkembangan dan pengembangan sosiologi di Indonesia, terutama sebagaimana Urry, Touraine dan Castells, yaitu dibutuhkannya teori dan metodologi serta pendekatan-pendekatan baru baik dalam melakukan penelitian maupun dalam penyusunan kurikulum pendidikannya. Dengan mengatakan bahwa kita di Indonesia tidak layak untuk memproteksi diri dari globalisasi, maka masyarakat kita saat ini tidak lain dari masyarakat global yang tidak dapat dipisahkan baik dalam urusan ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Karena itu dalam sosiologi kemudian akan tampak bentangan peta teori yang panjang dari sosiologi klasik, sosiologi modern (kontemporer) dan sosiologi posmodernisme. Demikian halnya dengan fenomena masyarakat maya yang mulai terorganisir dengan rapih, seperti facebook dan komunitas maya terbesar di Indonesia yang bernama "Kaskus", juga membutuhkan metodologi baru untuk memahami perubahan sosial di balik itu semua.

Fenomena sosial yang tengah berlangsung pesat di setiap belahan penjuru dunia ini pun telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat kita, untuk tidak mengatakan budaya, yang dikenal sebagai salah satu pasar terbesar kapitalisme lanjut, terutama ketika dilihat dari dominasi perusahaan-perusahaan asing dalam perdagangan ekonomi. Adalah Fredric Jameson, salah seorang

¹⁴ *Hypertext* merupakan teks elektronik yang menyediakan hubungan antara unsur-unsur kunci, yang memungkinkan penggunaannya untuk bergerak melalui informasi non-sekuensial. Istilah ini *hypertext* diciptakan pada tahun 1965 untuk menggambarkan tekstualitas yang bertentangan dengan tekstualitas linier buku, film, dan pidato. *Hypertext* juga sistem yang menyimpan teks, gambar, suara dan file lain yang memungkinkan untuk terhubung ke teks, gambar, suara dan lainnya yang terkait. Lihat Marcel Danesi, *Dictionary of Media and Communication*, New York, M.E. Sharpe, 2009, hlm. 151

¹⁵ Manuel Castells, "Toward a Sociology..", hal. 693-694

pemikir postmodernisme,¹⁶ yang menggunakan kerangka berpikir neo-marxis melihat bahwa realitas seperti hal di atas menunjukkan bahwa kita telah memasuki fase kapitalisme lanjut yang bercirikan; sirkulasi tanda dan simbol yang tiada hentinya, arus informasi berskala global serta konsumsi imaji yang hedonistik. Karena itu Jameson menyebut situasi semacam itu sebagai logika budaya kapitalisme lanjut yang berarti pula cerminan dari budaya posmodernisme.¹⁷

Postmodernisme pun telah menjadi salah satu minat akademik dalam sosiologi dan ilmu sosial lainnya di Indonesia guna membaca gejala-gejala sosial dan budaya, seiring dengan hadirnya beragama budaya baru khususnya di kalangan anak muda serta fenomena mall dan pasar modern yang juga turut merubah gaya hidup masyarakat perkotaan, di samping juga dengan mulai masifnya pengaruh teknologi internet sebagai alat komunikasi dan penyebaran informasi. Sebuah gambaran fenomena sosial yang oleh Castells dalam uraian di atas disebut sebagai masyarakat jejaring.

Hal tersebut semakin mendorong maraknya diskusi-diskusi dalam ilmu sosial khususnya sosiologi dengan pendekatan-pendekatan alternatif, terlebih ketika ditopang oleh terbitnya secara masif buku teks terjemahan khususnya terkait pemikiran-pemikiran postmodernisme dan kajian budaya sejak 1990-an. Patut dicermati bahwa industri penerbitan buku juga berkontribusi dalam penyebaran diskursus kritis dan posmodernisme dalam sosiologi khususnya sehingga turut menyuburkan perkembangan ilmu-ilmu sosial secara umum di luar perguruan tinggi.

Salah satu teori postmodernisme yang cukup berpengaruh adalah "Masyarakat Konsumer" (Consumer Society) yang dicetuskan Jean Baudrillard (1998). Ia menaruh perhatian pada persoalan realitas yang baginya uang saat ini telah mampu berbicara lebih dan apapun itu adalah gambaran (image) serta hiper-realitas. Kritik Baudrillard ini terutama bisa dilihat dari pengaruh media, khususnya media penyiaran di mana berlangsung secara kontinyu proses diseminasi budaya secara global mulai dari gaya hidup (lifestyle), perkembangan dunia *fashion*, sampai pada perkembangan masyarakat jejaring lewat medium

¹⁶ Istilah ini pertama kali digunakan oleh Federico de Onis di tahun 1930-an untuk mengindikasikan reaksi terhadap modernisme. Postmodernisme atau pascamodernisme kemudian populer pada tahun 1960-an saat digunakan oleh banyak kalangan kritikus di New York AS. Lihat Mike Featherstone, "Moderen dan Pascamoderen: Tafsiran dan Tetapan", *Prisma* no. 1, 1993, hlm. 3-14

¹⁷ Hendar Putranto, "Analisis Budaya dari Pascamodernisme dan Pascamodernitas" dalam *Teori-teori Kebudayaan*, Muji Sutrisno & Hendar Putranto (Eds), (Jogjakarta: Kanisius, 2005), hal. 245-246

internet yang didahului oleh perkembangan komputerisasi.¹⁸ Baudrillard sejatinya menyorot fenomena budaya postmodernisme dari konsep hiper-realitas, yaitu di mana segala sesuatunya menjadi rujukan, sementara yang dirujuk belum tentu gambaran akan kenyataan yang sesungguhnya (reality), karena yang dirujuk tersebut merupakan hasil konstruksi, terutama oleh peran media.

Sedangkan pemikir postmodernisme lainnya yang memberi pengaruh besar dalam perkembangan teori-teori sosial adalah Jacques Derrida. Salah satu gagasan kunci Derrida adalah "Dekonstruksi" yang bukan dimaknai sebagai proses membongkar dan menjungkir-balikkan keadaan yang semula. Baginya dekonstruksi berarti proses menelusuri jejak-jejak makna yang luput dari adanya dikotomi serta cerita tentang oposisi biner. Semula Derrida menaruh perhatiannya dalam konteks kritik sastra yang khususnya dialamatkan pada pemikiran strukturalisme Ferdinand de Saussure. Dalam oposisi biner yang diyakini oleh kalangan strukturalis itu, Derrida melihat terdapat celah atau ruang spasial, yang darinya kita bisa melihat sesuatu yang lain (the Others).¹⁹ Proses menelusuri jejak (traces) dalam dikotomi tersebutlah yang dikatakan dekonstruksi, yaitu bagaimana "Yang Lain" pada akhirnya menjadi layak diperhitungkan.

Konsep dekonstruksi Derrida ini semakin berkembang di kalangan pasca-kolonialis seperti Gayatri Spivak dalam tulisannya "*Can the Subaltern Speak?*", di mana "Yang Lain" dimaknai dengan konsep subaltern, sebagaimana dalam tradisi Gramscian untuk mengkritisi dominasi laki-laki atas perempuan.²⁰ Karena itu postmodernisme selain mengajak berpikir kritis terhadap fenomena sosial dan budaya kekinian, juga menawarkan keberpihakan kepada "Yang Lain" dengan dalih bahwa oposisi biner dalam bentuk apapun berpotensi melanggengkan dominasi dan kekuasaan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu pula, proses dekonstruksi Derrida pada konteks ini memiliki visi perdamaian yang dimungkinkan ketika ada pertentangan antara dua kubu dalam oposisi tersebut.

Sebagai perkembangan sosiologi kekinian yang banyak mendapatkan tantangan terutama oleh arus deras globalisasi yang telah merugikan

¹⁸ Sebuah buku yang menarik mengulas fenomena internet di Indonesia yaitu karya David T. Hill & Krishna Sen, *The Internet in Indonesia's New Democracy*, New York, Routledge, 2005

¹⁹ Lihat Kevin O'Donnel, *Postmodernisme* (Jogjakarta: Kanisius, 2009), hal. 46-47, dan Gayatri Spivak, *Membaca Pemikiran Jacques Derrida* (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2003), hal. 107-132

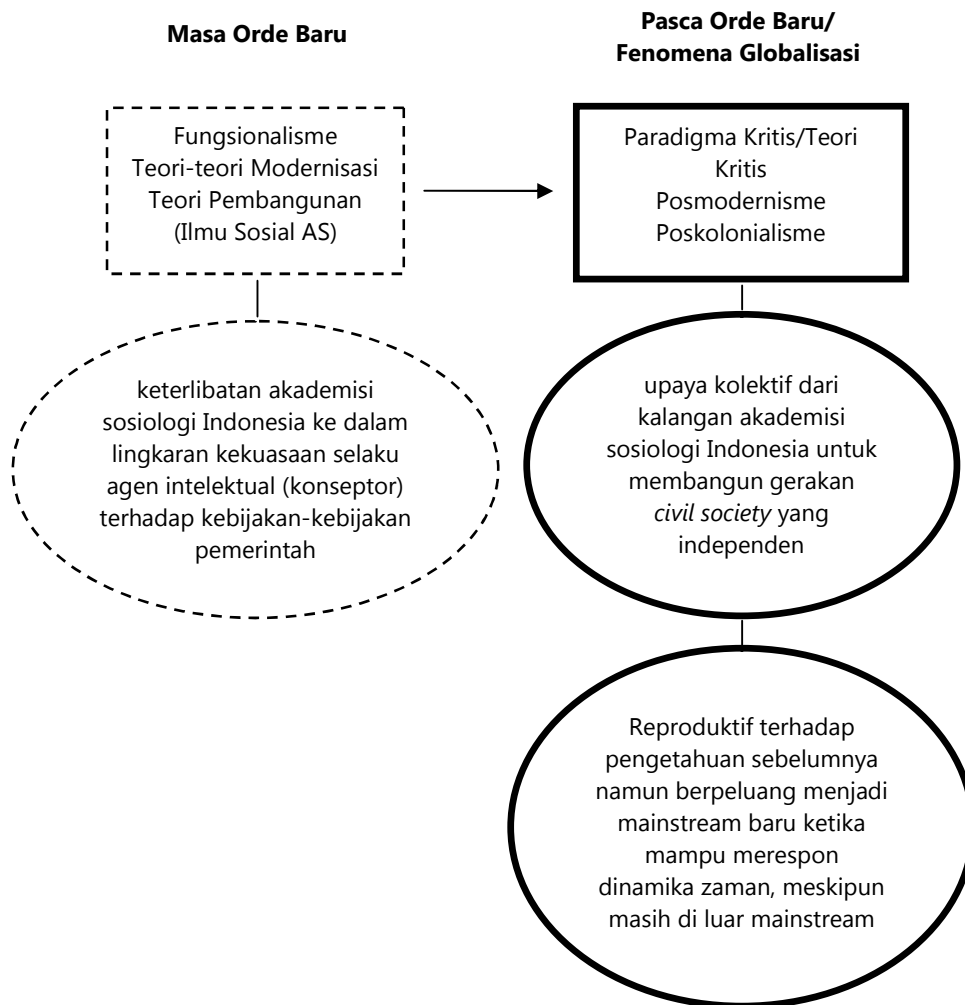
²⁰ Gayatri Spivak, "Can the Subaltern Speak?" dalam *The Post-Colonial Studies Reader*, Bill Ashcroft (Eds), (New York: Routledge, 2003), hal. 24-28

masyarakat marjinal khususnya, menuntut reorientasi dalam sosiologi itu sendiri, dan posmodernisme pada posisi yang kritis terhadap segala fenomena sosial dan budaya yang lahir dari rahim kapitalisme lanjut itu, merupakan alternatif teori, metodologi dan juga pendekatan sekaligus. Namun sebaliknya, penulis dalam hal ini sepakat apabila posmodernisme melepaskan paradigma kritis dan keberpihakannya maka ia hanya akan menjadi sarana canggih untuk menutupi sikap politik konservatif lewat bahasa yang kedengarannya radikal. Bahaya lainnya adalah hiper-empirisisme gaya Amerika Utara yang sibuk dengan metodologi canggih untuk menjawab persoalan yang banal.²¹ Karena itu posmodernisme dan beragam teori, metode dan pendekatan baru lainnya tidak cukup sebatas ia mampu beroperasi, tetapi juga bagaimana ia mampu untuk terus menjaga tugas sosiologi seperti misalnya yang pernah disinggung Manuel Castells yaitu agar masyarakat kita tidak kehilangan potensi kreativitasnya sehingga tidak pula ketinggalan dalam perjalanan di abad informasi saat ini, serta keberanian dari semua pihak untuk mengambil perannya dalam dunia global yang sudah terfragmentasi. Namun terlebih utama dari sebelum proses itu semua adalah bagaimana untuk tetap menjaga proses refleksi diri (self-reflection).

Di bawah ini bagan mengenai sosiologi Indonesia dari masa Orde Baru ke pasca Orde Baru serta fenomena globalisasi ditampilkan untuk menggambarkan bagaimana perkembangan tersebut bermula ketika paradigma fungsionalisme Parsonian yang melahirkan teori-teori modernisasi serta teori pembangunan sebagai karakter ilmu sosial AS begitu mewarnai iklim akademik sosiologi Indonesia. Sampai fenomena globalisasi sebagaimana yang diutarakan oleh Arjun Appadurai di atas sehingga mendapat respon akademik dari sosiologi Indonesia terutama dalam mengembangkan paradigma kritis seperti pemikiran-pemikiran posmodernisme dan poskolonialisme serta Teori Kritis Mahzab Frankfurt. Di samping juga tantangan bagi berlangsungnya demokrasi yang substansial dari tingkat lokal hingga nasional mengingat rejim otoritarian Orde Baru telah tumbang, meskipun peninggalannya pun masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

²¹ Wawancara dengan Vedi R. Hadiz, 28 Maret 2011 (melalui email)

Gambar I. Pergeseran Paradigma Sosiologi Indonesia
Dari Orde Baru, Pasca Orde Baru/Fenomena Globalisasi



Pergeseran sosiologi Indonesia dari masa Orde Baru ke Pasca Orde Baru yang juga ditandai dengan fenomena globalisasi di mana mulai mencuat paradigma kritis serta berbagai varian teoritis dan metodologi baru seperti teori kritis, posmodernisme dan poskolonialisme, tidak lantas menunjukkan bentuk resistensi yang memadai atas arus mainstream dari paradigma fungsionalisme Parsonian berikut teori-teori modernisasi dan pembangunan yang telah mengakar dalam tubuh ilmu sosial Indonesia termasuk sosiologi terutama di

masa Orde Baru. Artinya bahwa, berbagai persegeran pasca Orde Baru tersebut tetap berada pada wilayah di luar mainstream sosiologi Indonesia yang karena itu pula hanya bersifat reproduktif atas pengetahuan-pengetahuan sebelumnya.

Kesimpulan

Sosiologi Indonesia di masa Orde Baru juga tidak ubahnya dengan ilmu sosial lain yang tersedot ke dalam mainstream ilmu sosial AS dengan terutama sekali dipengaruhi oleh pemikiran atau gagasan fungsionalisme Parsonian. Meskipun ide-ide kritis seperti Marxisme dan Neo-Marxisme juga mewarnai perkembangan tersebut namun ia berada pada wilayah pinggiran karena kuatnya kekuasaan rejim Orde Baru yang berhasil mengkooptasi ilmuwan-ilmuwan sosial kritis. Di samping secara paradigmatis, ide pembangunan dan modernisasi yang cenderung dekat falsafah positivisme ini, telah menguasai jagat ilmu sosial di hampir seluruh belahan dunia pasca PD II.

Sementara itu, globalisasi sebagai fenomena kekinian yang juga melatarbelakangi perkembangan sosiologi Indonesia telah membuka jalan bagi proses dialektika keilmuan yang berupaya menjawab ekseseks globalisasi. Globalisasi di sini terutama bergerak pada wilayah ekonomi yang melahirkan tirani pasar bernama neoliberalisme dan pada wilayah kultural yang menciptakan masyarakat konsumtif, selain juga globalisasi pada wilayah perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang menggiring perubahan sosial menuju "masyarakat baru" yakni masyarakat jaringan (Castells, 2000) yang termediasi oleh internet (Urry, 2000). Oleh karena itu, sekian dampak globalisasi tersebut membidani kerangka teoritik dan metodologi alternatif seperti posmodernisme atau posstrukturalisme sebagai kacamata untuk menganalisis berbagai bentuk transformasi sosial. Akan tetapi, teori-teori dan metode-metode baru tersebut di tangan para sosiolog dan ilmuwan sosial kita belum mampu untuk dielaborasi ulang dengan sifat kritisnya agar menyatu dengan atmosfer budaya, sosial dan sejarah masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anreski, Stanislav. 1989. *Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi dan Agama*, Jogjakarta: Tiara Wacana
- Appadurai, Arjun. 2006. "Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy" dalam *Media and Cultural Studies: Keywords*, Meenakshi Gigi Durham & Douglas M. Kellner (Eds), Oxford: Blackwell Publishing

- Baudrillard, Jean, 1998. *The Consumer Society: Myths & Structures*, London: Sage Publications
- Bauman, Zygmunt. 2009. *Towards A Critical Sociology: An Essay on Commonsense and Emancipation*, London & Boston: Routledge
- Durkheim, E. 2009. *Sociology and Philosophy*, New York: Routledge
- Escobar, Arturo. 1995. *Encountering Development : The Making and Unmaking of The Third World*, New Jersey: Princeton University Press
- Fakih, Mansour. 2002. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press
- Giddens, Anthony. 2009. *Konsekuensi-konsekuensi Modernitas*, Jogjakarta: Kreasi Wacana
- Giddens, Anthony. 2010. *Metode Sosiologi: Kaidah-kaidah Baru*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Harvey, David. 2005. *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford: Oxford University Press
- Heertz, Norena. 2005. *Perampok Negara: Kuasa Kapitalisme Global dan Matinya Demokrasi*, Jogjakarta: Alenia
- Heertz, Norena. 2004. "Hidup di Dunia Material: Munculnya Gelombang Neoliberalisme" dalam Wibowo dan Wahono, Francis (Eds), *Neoliberalisme*, Jogjakarta: Cindelas
- Laclau, Ernesto dan Mouffe Chantal. 2008. *Hegemoni dan Strategi Sosialis: Postmarxisme + Gerakan Sosial Baru*, Jogjakarta: Resist Book
- O'Donnel, Kevin. 2009. *Postmodernisme*, Jogjakarta: Kanisius
- Putranto, Hendar. 2005. "Analisis Budaya dari Pascamodernisme dan Pascamodernitas" dalam *Teori-teori Kebudayaan*, Muji Sutrisno & Hendar Putranto (Eds), Jogjakarta: Kanisius
- Ritzer, George. 2005. *Teori Sosial Postmodern*, Jogjakarta: Kreasi Wacana
- Robertson, Roland. 1992. *Globalization: Social Theory and Global Culture*, London: Sage Publication
- Samuel, Hanneman. 2010. *Emile Durkheim: Riwayat, Pemikiran, dan Warisan Bapak Sosiologi Modern*. Depok: Kepik Ungu
- Spivak, Gayatri. 2003. *Membaca Pemikiran Jacques Derrida*, Jogjakarta: Ar-Ruzz

Spivak, Gayatri. 2003. "Can the Subaltern Speak?" dalam *The Post-Colonial Studies Reader*, Bill Ashcroft (Eds), New York: Routledge

Turner, Bryan. S. 2003. *Teori-teori Modernitas dan Posmodernitas*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar

Urry, John. 2000. *Sociology Beyond Societies: Mobilities for The Twenty-First Century*, New York: Routledge

Makalah, Majalah, Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Castells, Manuel, "Toward a Sociology of the Network Society". *Contemporary Sociology*, Vol. 29, No. 5 (Sep., 2000), hal. 693-699, American Sociological Association

Featherstone, Mike, "Moderen dan Pascamoderen: Tafsiran dan Tetapan". *Prisma* no. 1, 1993 hal. 3-14

Haryatmoko, "Kekuasaan-Pengetahuan sebagai Rezim Wacana". Makalah Seri Kuliah Umum, Juni 2010, Jakarta, Komunitas Salihara

Touraine, Alain, "Sociology after Sociology". *European Journal of Social Theory* 10(2) (2007), hal. 184-193, Sage Publications

Wallace, Walter L, "Why Sociology Doesn't Make Progress". *Sociological Forum*, Vol. 10, No. 2 (Jun., 1995), hal. 313-318, Springer

